

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Sri Rahayu, Yudi, Salman Jumaili, Rahayu dan Muhammad Ridwan
Pascasarjana Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Koperasi di Indonesia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dan jenis usaha terus meningkat, walaupun tidak dapat dipungkiri jumlah koperasi yang tutup usaha dan tidak aktif juga tidak sedikit. Salah satu penyebabnya adalah dari sisi lemahnya pengelolaan keuangan oleh pengurus, sehingga keberlangsungan usaha tidak dapat dipantau dan menimbulkan ketidakpercayaan dari anggota koperasi. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk pertama untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus koperasi dalam pengelolaan keuangan khususnya terkait penyusunan laporan keuangan sehingga informasi keuangan dapat dimanfaatkan untuk rencana pengembangan usaha. Mitra kegiatan ini adalah Koperasi Bangun Setia Kecamatan Merangin Jambi. Pelatihan diberikan kepada pengurus dan staf koperasi. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bisa digunakan sebagai salah satu dasar untuk penetapan kebijakan atau keputusan pengembangan usaha dan menjadi pertanggungjawaban kepada anggota dan stakeholders lainnya. Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Harapan dari mitra, kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti ini dapat dilakukan kembali di Koperasi Bangun Setia pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Koperasi, Laporan Keuangan, Ekonomi Rakyat

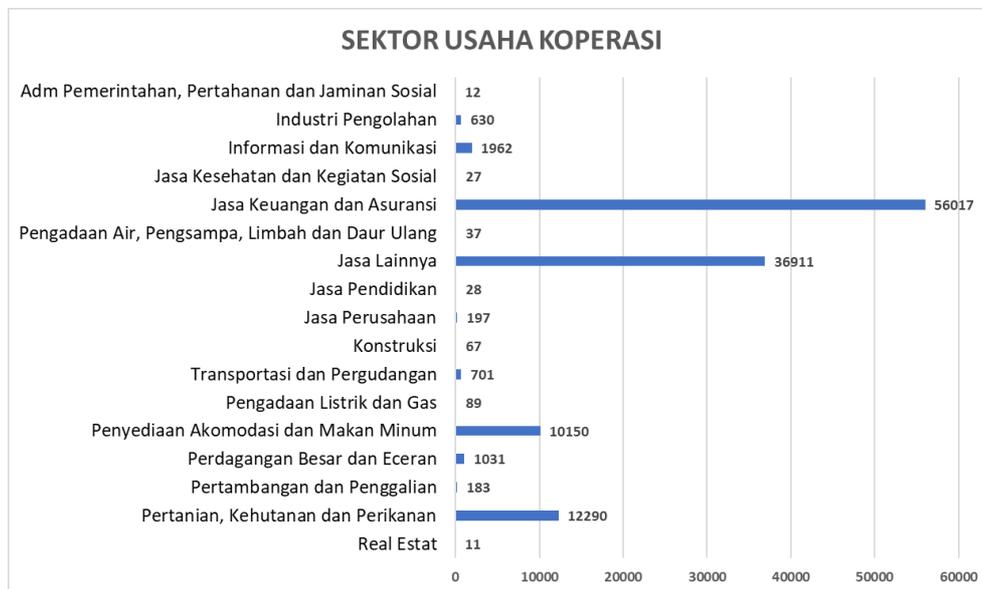
PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bentuk usaha yang terus dikembangkan di nusantara sesuai dengan rekomendasi Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi diharapkan berkembang karena dianggap sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yaitu Gotong Royong. Kemandirian koperasi sangat diharapkan sehingga koperasi menjadi usaha yang mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri, mampu memperoleh laba sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha usahanya serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Pembangunan struktur ekonomi yang kuat dengan landasan keunggulan kompetitif wilayah serta dukungan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan daya saing menjadi salah satu target yang ditekankan dalam RPJPN (rencana pembangunan jangka panjang nasional) 2020-2025 dan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Tujuh target agenda nasional untuk pembangunan yang masuk dalam program yang diprioritaskan, salah satunya yaitu meningkatkan kekuatan atau ketahanan secara ekonomi agar dapat tumbuh dengan kualitas dan adil. Koperasi dan UMKM terus menjadi perhatian pemerintah dan dikembangkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi. Tuh koperasi juga menjadi cerminan implementasi pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan Pancasila.

Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia terus melakukan reformasi total terhadap perkoperasian di Indonesia. Salah satu hasilnya terjadi peningkatan sumbangan Produk Domestik Bruto-PDB koperasi terhadap Produk Domestik Bruto-PDB nasional meningkat 1,11% dari Tahun 2016 ke Tahun 2018 (Kemenkop, 2020). Juga berdampak kepada tercapai anggota koperasi dan masyarakat yang sejahtera dan diharapkan juga akan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Koperasi yang dicerminkan

melalui jumlah volume usaha koperasi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu juga terjadi kenaikan jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 89,69% (10.621.323 orang) dari tahun 2016 ke tahun 2019 (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020). Berdasarkan sektor usaha, perkembangan jenis usaha koperasi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Sektor Usaha Koperasi Indonesia
Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020.

Berdasarkan gambar 1.1, Koperasi bidang usaha pertanian, kehutanan dan perikanan termasuk peringkat ketiga tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan koperasi untuk sektor usaha ini cukup menjanjikan untuk terus dioptimalkan.

Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia juga mencermati fenomena ketidakaktifan koperasi, data menunjukkan sebanyak 40.013 unit koperasi telah dibubarkan. Operasi tersebut teridentifikasi tidak lagi aktif, tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan untuk 3 tahun atau usaha koperasi tidak lagi berjalan. Kendala pengelolaan keuangan lainnya antara lain lahan koperasi yang tidak berkembang dan mengalami defisit serta masih belum optimalnya pemberdayaan (1) motivasi yang salah saat mendirikan koperasi hanya bertujuan untuk mengharapkan bantuan dari pemerintah (2) adanya kesalahpahaman dalam pengurusan koperasi, penggunaan koperasi untuk kepentingan pribadi pengurus; (3) kompetensi sumber daya manusia dan komitmen baik pengurus maupun pembina koperasi yang masih terbatas (Kemenkopukm, 2020). Kelemahan pengelolaan keuangan koperasi lainnya berupa keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan ketidakjelasan perlakuan akuntansi (Krisnadewi dkk, 2017). Salah satu cara untuk mengurangi munculnya kesalahpahaman dalam pengurusan koperasi antara pengurus, anggota dan badan pengawas adalah dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Perangkat organisasi utama koperasi yaitu pengurus, rapat anggota dan badan pengawas. Kuasa tertinggi koperasi adalah Rapat anggota. Hasil rapat anggota dilaksanakan oleh pengurus koperasi sedangkan yang menjadi pengawas untuk memastikan pengurus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan hasil rapat anggota diamanahkan kepada badan pengawas koperasi. Pengurus menjadi pihak yang dituntut untuk paling aktif dalam menjalankan usaha koperasi karena terlibat langsung dalam kegiatan keseharian operasional koperasi. Oleh karena itu komitmen dan kemampuan pengurus koperasi yang baik sangat diharapkan sehingga dapat memajukan koperasi.

Pengelolaan keuangan penting untuk diperhatikan oleh pengurus koperasi. Tanggung jawab pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas telah diamanahkan secara khusus dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Ayat 1, Pasal 30. Pembangunan dan pengembangan koperasi sebagai badan usaha yang juga berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat, maka koperasi harus dikelola dengan prinsip terbuka, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat terwujud melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib (Per/M.KUKM/VII/2012).

Koperasi Bangun Setia beralamat di Kelurahan Kampung Baruh, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi telah berdiri sejak tahun 2007, Koperasi dengan usaha di bidang perkebunan. Koperasi ini merupakan koperasi yang didirikan oleh para petani plasma perkebunan kelapa sawit dari PT Sari Aditya Loka (SAL) di Kabupaten Merangin. Hasil wawancara tim dengan Pengurus Koperasi pada survei awal di Januari 2021 diketahui bahwa koperasi ini berhasil menjadi koperasi perkebunan dengan omzet penjualan tertinggi di Kabupaten Merangin sejak tahun 2018. Nilai omzet penjualan setiap dua minggu sudah mencapai kurang lebih Rp. 900 Juta sampai dengan Rp. 1,2 Miliar. Selain usaha tandan buah segar-TBS kelapa sawit, dalam 3 tahun terakhir, koperasi telah mengembangkan usaha berupa bidang usaha simpan pinjam untuk anggota koperasi. Simpan pinjam koperasi baru mengakomodir untuk peminjaman individu anggota, belum peminjaman anggota secara berkelompok.

Diskusi tim dengan salah satu pengelola keuangan koperasi ditemukan bahwa saat ini ada masalah yang dihadapi yaitu pengelolaan keuangan yang masih perlu dioptimalkan, khususnya untuk usaha simpan pinjam. Koperasi telah menggunakan sistem excel untuk mencatat transaksi hariannya namun belum terintegrasi dengan pelaporan keuangan. Koperasi hanya memiliki informasi keuangan berupa laporan kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan saja, belum menyusun laporan keuangan lengkap sesuai aturan yang berlaku. Salah satu kelemahan yang timbul adalah tidak diperolehnya informasi keuangan yang lengkap. Selain itu, selama ini koperasi melakukan pengembangan usaha koperasi belum berdasarkan data keuangan, sehingga potensi risiko likuiditas dan estimasi profitabilitas usaha belum dapat ditaksir dengan optimal. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada pengembangan usaha yang tidak mampu untuk bertahan lama.

Permasalahan utama Koperasi Bangun Setia sama dengan koperasi lain yang masih berkembang pada umumnya, yaitu salah satunya terkait pengelolaan keuangan. Permasalahan pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dan transparan dapat menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan pengurus dengan anggota. Koperasi yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan sangat membantu pengurus mampu mempertanggungjawabkan kegiatan koperasi baik kepada anggota maupun kepada stakeholder lainnya dan operasional koperasi oleh pengurus. Salah satu hasil dari administrasi pengelolaan keuangan koperasi yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar bagi anggota untuk melakukan evaluasi terhadap pengurus dan untuk mengusulkan rencana pengembangan usaha koperasi selanjutnya. Dari sisi Badan Pengawas, laporan keuangan koperasi dasar untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan kegiatan operasional koperasi yang dijalankan oleh pengurus.

Beberapa masalah yang dihadapi Mitra adalah masih terbatasnya kemampuan pengelolaan keuangan khususnya administrasi keuangan yang terintegrasi ke laporan keuangan untuk usaha simpan pinjam. Permasalahan ini berdampak kepada proses pengelolaan keuangan yang belum optimal, perlu waktu yang lebih banyak dan data keuangan yang tidak up to date setiap waktu. Koperasi diharapkan mampu membantu menjadi stabilitas ekonomi masyarakat, dengan pertimbangan kondisi saat ini terjadi kondisi ekonomi anggota cenderung turun masa Pandemi wabah Covid 19. Perkembangan Koperasi bukan hanya menjadi tanggung jawab dari

Kementerian Koperasi dan UMKM saja, tetapi jadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kontribusi dari berbagai pihak termasuk akademisi untuk berperan aktif sangat dibutuhkan dalam memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi sehingga mampu meningkatkan kompetensi sumber daya pengurus. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat di Koperasi Bangun Setia tentang penyusunan laporan keuangan dan pemanfaatan informasi keuangan dalam pengembangan usaha.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan PPM diperlukan untuk menyelesaikan solusi yang ditawarkan untuk masalah yang dihadapi pengurus koperasi yang menjadi mitra kegiatan ini. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Tahap penyusunan rencana, Tim PPM melakukan penyusunan proposal, survei awal, koordinasi awal dan pengajuan proposal ke LPPM.
2. Tahap Pelaksanaan, metode dan tahapan dalam kegiatan diseminasi dalam bentuk pelatihan, maka tim akan menyusun aplikasi sederhana penyusunan buku kas umum yang terintegrasi dengan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Pelatihan dilaksanakan secara off line karena jumlah peserta juga terbatas. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan proses diskusi dan pelatihan.
3. Tahap evaluasi kegiatan dan potensi pengembangan program lanjutan setelah selesai kegiatan.
 - a. Evaluasi akan dilakukan setelah selesai pelatihan dilaksanakan untuk menilai keefektifan kegiatan. Hal ini membutuhkan partisipasi pengurus dan anggota badan pengawas
 - b. Evaluasi terhadap perbaikan tata kelola keuangan koperasi. Untuk evaluasi ini tim membutuhkan partisipasi dari anggota koperasi dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Merangin.

Mitra berpartisipasi dalam proses diskusi untuk identifikasi masalah yang akan digunakan untuk penyusunan proposal, usulan staf dan pengurus koperasi yang ikut pelatihan, jenis aplikasi yang dibutuhkan dan pada tahap evaluasi. Mitra juga menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan secara *offline*.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Observasi awal berupa wawancara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Mitra antara lain yaitu: kurangnya literasi (pemahaman) pengurus koperasi khususnya bagian pengelola keuangan tentang penyusunan laporan keuangan dan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengurus untuk memanfaatkan informasi keuangan untuk rencana pengembangan usaha koperasi. Koperasi ini beralamat di Kecamatan Rantau Panjang Tabir Merangin Jambi. Koperasi berdiri sejak tahun 2004 dan termasuk koperasi yang masih mampu bertahan dan berkembang sampai saat ini. Koperasi mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Perkebunan untuk menempati Eks Gedung Perkebunan yang sudah lama tidak ditempati. Koperasi ini merupakan mitra dari PT Sari Aditya Loka Merangin. Anggota koperasi yang memiliki lahan sawit menyerahkan hasil panen sawit kepada PT Sari Aditya Loka Merangin melalui Koperasi. Seluruh administrasi dan proses penjualan dilakukan oleh koperasi. Harga buah sawit dihargai oleh perusahaan sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. Selisih harga dibandingkan penjualan kepada pedagang sawit di luar biasanya lebih tinggi kurang lebih Rp.300,- sampai dengan Rp.400,-

rupiah per kilogram. Kesepakatan standar harga ini telah disepakati koperasi dan perusahaan dari awal kerjasama. Hal ini tentu lebih menguntungkan bagi anggota koperasi.

Tim pengabdian melakukan diskusi awal tentang pengelolaan keuangan koperasi sebelum kegiatan dilakukan. Diskusi ini dilakukan dengan salah satu staf pengelola keuangan koperasi. Dari proses diskusi dapat diketahui bahwa Koperasi Bangun Setia ini telah melakukan penyusunan buku kas umum, daftar piutang, daftar inventaris koperasi dan laporan perhitungan hasil usaha. Informasi keuangan juga telah disampaikan kepada anggota melalui rapat anggota tahunan. Pembayaran hak-hak petani dilakukan melalui transfer bank. Koperasi meminta seluruh anggota koperasi, minimal ketua kelompok memiliki rekening bank. Transaksi melalui bank dipilih karena lebih aman dan tertib baik bagi koperasi maupun anggota. Administrasi keuangan yang dilakukan koperasi cukup tertib karena seluruh transaksi keuangan juga telah didukung dengan bukti transaksi. Namun koperasi belum menyusun laporan keuangan selain perhitungan hasil usaha, seperti neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Administrasi keuangan yang baik memang sangat dibutuhkan suatu organisasi. Saldo akun yang disajikan dalam laporan keuangan dengan dukungan administrasi yang baik dan benar akan sangat membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Rahayu dkk, 2019).

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada awal September 2021 bertempat di Kantor Koperasi Bangun Setia. Peserta kegiatan adalah pengurus dan staf koperasi. Kegiatan pelatihan berlangsung dengan lancar. Pihak koperasi mengharapkan tim tetap akan melakukan kegiatan pendampingan setelah selesai kegiatan. Peran serta para akademisi untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan koperasi sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan pengurus koperasi. Pemahaman yang luas terhadap optimalisasi pengelolaan keuangan koperasi akan menjadikan penyelenggaraan koperasi akan lebih baik.

Tim Pengabdian ini berharap dapat berkontribusi untuk mendukung program pemerintah tersebut melalui kegiatan dengan sasaran/target sebagai berikut:

1. Kualitas SDM meningkat sehingga memadai untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat yang berkualitas,
2. Proses pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi biaya, akuntabilitas dan transparansi keuangan koperasi.
3. Anggota dapat menerima pelayanan berkualitas untuk meningkatkan rasa percaya terhadap pengurus, dan
4. Pelayanan koperasi bagi anggota tetap berjalan dengan lancar selama masa new normal akibat pandemic COVID-19.

Sasaran/target ini ditetapkan sebagai usaha peningkatan kompetensi pengurus koperasi dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi rakyat yang berkualitas. Koperasi juga akan mampu meningkatkan layanan yang efisien dari sisi biaya sehingga mudah untuk dilakukan pengawasan baik dari sisi penyelenggaraan proses pengelolaan keuangan maupun layanan lainnya.

Standar akuntansi yang digunakan koperasi untuk pedoman penyusunan laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (IAI, 2013). Adapun Laporan Keuangan usaha simpan pinjam yang harus disiapkan koperasi simpan pinjam sesuai dengan Per/M.KUKM/IX/2015. Laporan keuangan merupakan alat komunikasi bagi para stakeholders untuk menganalisis kondisi dan kinerja perusahaan (Yusuf, 2011). Badan pengawas juga dapat lebih optimal dalam melakukan pemantauan, apabila laporan keuangan telah disusun dengan baik. Pengawasan pengelolaan keuangan menjadi penting karena akan meningkatkan efektifitas suatu organisasi dalam memberikan layanan (Rahayu, dkk, 2019). Selain itu, koperasi juga harus memperhatikan akuntabilitas dan transparansi agar dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak khususnya anggota koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mitra kegiatan telah memiliki beberapa data dan informasi keuangan sederhana. Laporan tersebut disiapkan khususnya untuk bahan rapat anggota tahunan koperasi. Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu menjadikan koperasi menjadi lebih mandiri, administrasi keuangan lebih tertib dan akuntabel serta dapat meningkatkan kepercayaan anggota. Selain itu, diharapkan koperasi juga mampu melakukan evaluasi atas kinerja keuangan koperasi untuk salah satu dasar pengembangan usaha. Berdasarkan proses pengabdian yang telah dilaksanakan, maka sebaiknya kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan koperasi sebaiknya menjadi salah satu target yang harus dibina bukan hanya oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi juga oleh lembaga pendidikan tinggi. Mitra kegiatan ini mengharapkan kegiatan ini juga dapat terus dilanjutkan dengan memperluas target sasaran ke koperasi lain dan menambah materi kegiatan seperti penyusunan kebijakan akuntansi dan perpajakan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013, Standar Akuntansi Keuangan, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Cetakan Ketiga.
- Krisnadewi, K. A, N.M.A Erawati, E.A. Sisdyani dan I.W P Wirasedana, 2017, Penyusunan Kebijakan Pengelolaan dan Akuntansi pada Koperasi KKS, Buletin Udayana Mengabdikan, Volume 16, No.3, September, 302- 306
- Peraturan Menteri Kementerian Koperasi dan UMKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012, 2015, Pedoman Akuntansi Koperasi, kemenkopukm.go.id
- Peraturan Menteri Kementerian Koperasi dan UMKM No 13/Per/M.KUKM/IX/2015, 2015, Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kemenkopukm.go.id
- Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020, Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2021, kemenkopukm.go.id
- Rahayu, S., Mukhzrudfa, Yuliusman, Yuliana. (2019). Praktik Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja, Vol. IV, Jan-Maret
- Rahayu, S., Yudi, Rahayu & Yuliana, (2019), Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Bahan Habis Pakai Sekolah, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Vol 3, No.1, Desember.
- Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Yusuf, Al Haryono, 2011, Dasar-Dasar Akuntansi, Jilid 2, Cetakan Pertama, Desember, STIE YKPN, Yogyakarta.